

LEMBAR FAKTA BIAK

Latar Belakang

Mundurnya Soeharto pada 1998 memunculkan harapan akan adanya perubahan akan kekerasan yang terus terjadi di Papua. Namun, gerakan sipil yang mengekspresikan aspirasi atas hak menentukan nasib sendiri selalu berhadapan dengan kekerasan. Pada 2–6 Juli 1998, pasukan keamanan melakukan penembakan, penyiksaan serta penangkapan sewenang-wenang untuk membubarkan demonstran di menara air di belakang Puskesmas Biak. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Biak Berdarah.¹

Bahan Bacaan Lebih Lanjut untuk Kasus Biak Berdarah 1998:

1. Laporan ELSHAM Papua kepada Komnas HAM, Nama Tanpa Pusara, Pusara Tanpa Nama: Laporan Pelanggaran HAM di Biak, Irian Jaya. (ELSHAM Papua, 1999)
2. Putusan dari pengadilan warga (citizen's tribunal) atas kasus Biak Berdarah, Biak Massacre Citizen's Tribunal Verdict, (biak-tribunal.org, 2013)

Kekerasan aparat keamanan terhadap warga sipil di Biak tidak hanya terjadi sekali. Kekerasan dan pelanggaran HAM di Biak bisa dilihat setidaknya sejak tahun 1960 (sebelum Pepera). Ini ditandai dengan bentrokan antara tentara Indonesia dan pasukan OPM, diikuti dengan kekerasan aparat keamanan langsung terhadap warga sipil. Mereka yang dianggap menentang integrasi dengan Indonesia juga mendapatkan kekerasan dan penahanan sewenang-wenang

Melalui Operasi Trikora yang dimulai pada 1961,

aparat keamanan menyisir kampung-kampung untuk mencari orang-orang Papua yang terlibat dalam gerakan Papua Merdeka. Mereka yang tertuduh maupun terindikasi terlibat dalam gerakan kemerdekaan mengalami penyiksaan hingga pembunuhan. Di Biak Barat, tentara Indonesia membuka markas di kampung Adadikam pada 1967. Masuknya tentara ke kampung-kampung dan pembukaan markas tersebut mengakibatkan banyak penduduk mengungsi ke hutan. Sementara di Biak Utara, tentara Republik Indonesia membakar kampung Wouna lantaran mengibarkan bendera bintang kejora.² Operasi Sadar pada 1968 menahan anggota Gerakan Sampari di Biak, kelompok guru yang melakukan perlawanan tidak bersenjata.³ Operasi militer di Papua kemudian dilanjutkan dengan Operasi Tumpas pada 1971–1989 di Biak Barat dan Biak Utara. Penembakan, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan penculikan terjadi semasa operasi ini.⁴

Pola ini terus terjadi selepas Reformasi sampai saat ini. Pada 2015, Manfun, Apolos Sroyer, Matheus Bonsaifer, dan Yudas Kosay ditangkap dengan dalih melakukan pengibaran bendera bintang kejora. Penangkapan dan penggunaan pasal makar kepada kelompok-kelompok gerakan Papua Merdeka yang melakukan demonstrasi damai, seperti KNPB, juga terus dilakukan.⁵

2 Hasil Workshop Refleksi Korban Pelanggaran HAM di Biak, 14–15 April 2023

3 Masa Lalu yang Tak Berlalu, ICTJ dan ELSHAM, hlm. 15

4 *Ibid*

5 Hasil Workshop Refleksi Korban Pelanggaran HAM di Biak, 14–15 April 2023

1 *Masa Lalu yang Tak Berlalu* (ICTJ dan ELSHAM) hlm. 22,

Pengalaman dan Situasi Korban⁶

Bersama Papuan Women's Working Group (PWC), pada bulan April 2023, AJAR terlibat dalam refleksi situasi korban pelanggaran HAM di Biak bersama 30 perempuan korban dan penyintas yang berasal dari Biak Kota, Biak Utara dan Biak Barat. Kami menggunakan metode penelitian aksi partisipatif dalam melihat pengalaman korban di situasi konflik dan keadaan mereka saat ini.

Selain kekerasan fisik yang dialami langsung oleh para peserta yang terlibat, mereka juga menceritakan pengalaman kehilangan anggota keluarga karena situasi konflik. Sebelas dari tiga puluh peserta menceritakan pengalaman kehilangan anggota keluarga inti, baik karena menjadi tenaga bantuan operasi, ditahan, terpisah saat mengungsi ke hutan atau disiksa sampai meninggal dan dibunuh karena mendukung dan/atau terlibat dalam gerakan Papua Merdeka

Gambar rumah dan pohon kelapa. Gambar ini mengingatkan saya tentang masa kecil saya; kehidupan keluarga saya dengan adik laki-laki saya. Kita hidup sama-sama di sini, kami dua selalu duduk naik turun di pohon ini. Tempatnya di Wouna tahun 1975. Saya bersama-sama dengan adik dan ibu di rumah ini sementara bapa saya diambil oleh tentara Hasanuddin untuk jadi tenaga pikul barang-barang tentara dan cari orang-orang yang ada di hutan. Tahun 1979 kami sudah ada di sini, kami masih kecil. Masyarakat semua sudah pulang ke kampung Rarwaina. Masa kesedihan saja di tahun 1975. Saya kelahiran tahun 1965”
- YBU

Di Biak Utara, 6 peserta menceritakan pengalaman mereka mengungsi ke hutan pada tahun 1966–1968 lantaran kampung Wouna, tempat tinggal mereka dibakar oleh tentara Indonesia sebab mengibarkan bintang kejora. Sejak kampung mereka diduduki tentara, masyarakat mengungsi di hutan selama dua tahun. Bekerjasama dengan aparat, pada 1980, LAPAN mengintimidasi penduduk agar melepaskan tanahnya untuk pembukaan lahan.

Peserta juga menceritakan pengalaman diskriminasi yang mereka alami karena stigma separatis yang melekat kepada mereka:

Apalagi macam saya anak pertama tidak bisa sekolah karena ortu dianggap melakukan kejahatan. OPM dianggap sebagai kejahatan.–MBB

Stigma separatis yang dilekatkan kepada penyintas menghambat akses mereka dalam mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia, seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kesehatan dan jaminan dan layanan sosial lainnya. Trauma dan stigma yang masih ada sampai saat ini juga membuat para penyintas enggan untuk menceritakan kekerasan yang mereka alami sebab merasa malu dan takut akan mengalami diskriminasi yang lebih dalam.

Posisi penyintas semakin rentan lantaran kebun dan tanahnya hilang dirampas sejak mereka mengungsi, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Mengingat usia penyintas yang sudah semakin tua (rata-rata usia peserta workshop refleksi ini adalah 51 tahun), maka akses kesehatan terdekat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan berkala semakin dibutuhkan. Sejauh ini, kesulitan masih dihadapi oleh beberapa peserta yang telah mencoba mengakses jaminan kesehatan dan bantuan lainnya dengan membawa kartu identitas dan mendaftarkan diri, baik ke pemerintah kampung maupun dinas sosial. Adapun akses layanan dan jaminan

seperti BLT, Dana Desa, Bantuan COVID-19, dan Kartu Keluarga Sejahtera masih belum merata sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.

Kekuatan dan Pengharapan

Korban hingga saat ini masih hidup dalam lingkaran kekerasan dan diskriminasi. Para penyintas menceritakan bagaimana keluarga (anak, cucu) dan berdoa menjadi kekuatan mereka dalam terus berjuang melanjutkan hidup dan perjuangan. Harapan akan generasi muda untuk melanjutkan perjuangan dan mencapai rasa aman juga menumbuhkan semangat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Para peserta juga mengharapkan anak-anak muda untuk terus mengejar pemenuhan hak-hak perempuan dan hak-hak masyarakat adat yang ada di Tanah Papua karena para orang tua tidak bisa berjalan sendiri.

Penguatan solidaritas antar korban dan penyintas juga direncanakan dan dilakukan dalam berbagai cara:

Memorialisasi Biak Berdarah setiap tanggal 6 Juli dengan melakukan ibadah bersama dan napak tilas makam-makam tak bernama;

Pertemuan kelompok doa DEBAR Biak

Kegiatan ekonomi alternatif sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber ekonomi alternatif para korban dan penyintas